

TESIS

PENYELESAIAN SENGKETA PENGUSAAN TANAH

TIMBUL (AANSLIBING) DALAM SISTEM HUKUM

PERTANAHAN INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP)



Oleh :

PRO PATRIA

LIE LIEM DESEMBER

NIM. 12216038

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018

TESIS

Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum
Pertanahan Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP)

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh :
LIE LIEM DESEMBER
NIM : 12216038

PRO PATRIA

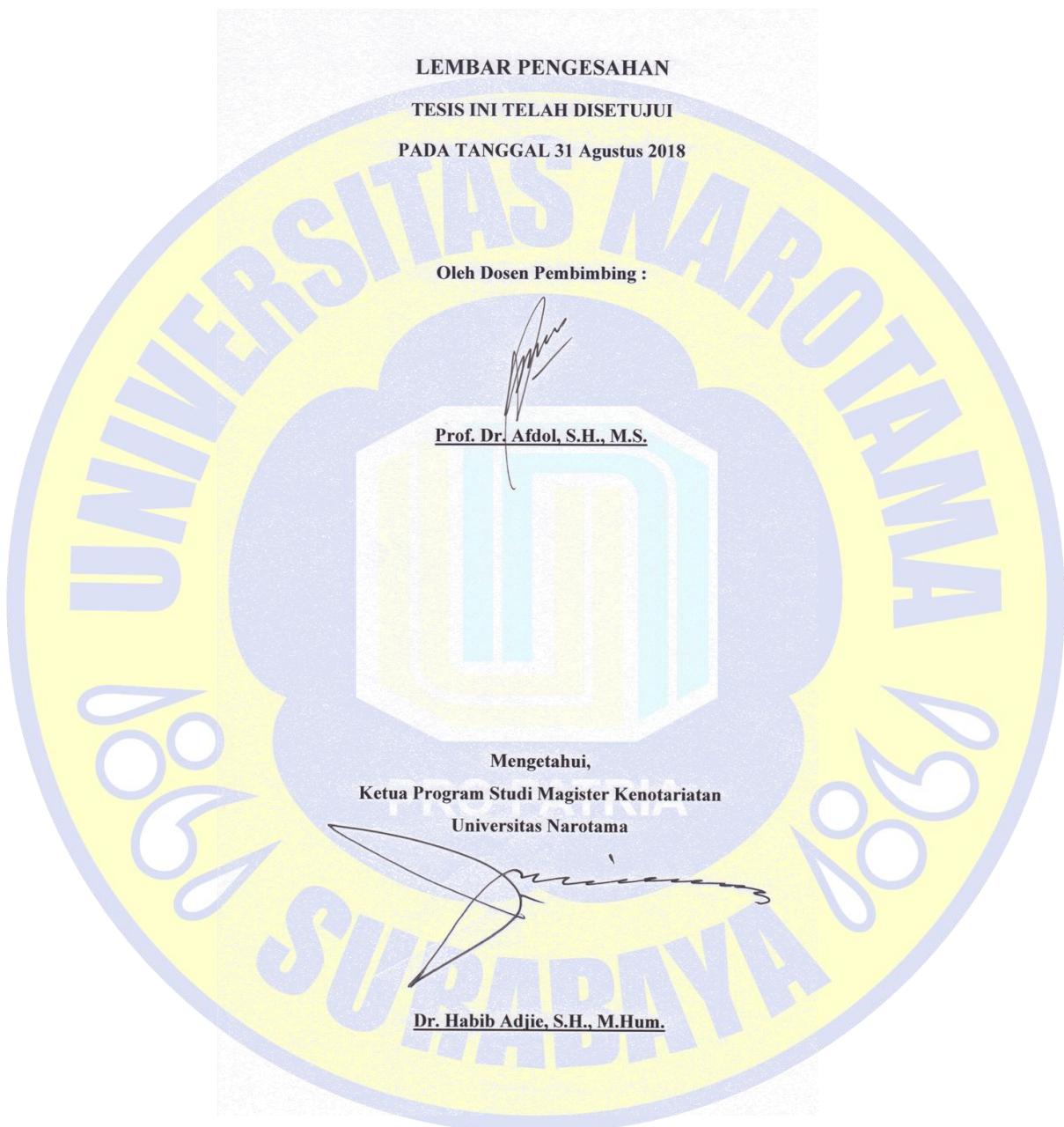
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018



LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 2018

Oleh Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117

Website : www.narolama.ac.id

No Dokumen : FM-MKn-05-01
Tgl Terbit : 10 Desember 2014
Revisi : 00

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS*

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember

No. Induk Mahasiswa : 12216038

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 13

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia

2. _____

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Afadol, S.H., M.S.
2. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.
3. _____

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Surabaya, 26 Februari 2018
Mahasiswa

Lie Liem Desember

* Pengajuan Judul Tesis harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Tesis
3. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 2 (IPK Minimal 3,00)
4. F/C Sertifikat Seminar MKn



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S.

Jabatan Fungsional : Dekan Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember

No. Induk Mahasiswa : 12216038

Judul : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem
Hukum Pertanahan Indonesia

Surabaya, 26 Februari 2018
Calon Pembimbing,

Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.

*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

Jabatan Fungsional : Ketua Program Studi Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember

No. Induk Mahasiswa : 12216038

Judul : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem
Hukum Pertanahan Indonesia

Surabaya, 26 Februari 2018
Calon Pembimbing,

Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS*

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan dan setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

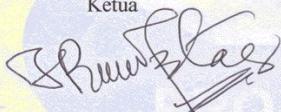
Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak menyetujui *) judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut:

- I. Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember
Nomor Induk Mahasiswa : 12216038
Program Studi : Magister Kenotariatan
- II. Judul Tesis: Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia
- III. Pembimbing: Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S. dan Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

Disetujui oleh Dewan Tesis,

Di Surabaya, Pada Tanggal 27 Februari 2018

Ketua


Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H., M.H.

Sekretaris


MOH. SALEH, S.H., M.H.

* coret yang tidak perlu

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Ini Telah Disetujui

Pada Tanggal: 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. Afdal, S.H., M.S.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama

(Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum.)



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

SURAT PENUGASAN

No. 343/NR-FH/03/III/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Rektor I Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Prof. Dr. Afdol,SH.,MS. Tahegga Primananda Al-fath, S.H., M.H. (Co)	12216038	Lie Liem Desember	Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Maret 2018

Wakil Rektor I,



PRO PATRIA

DR. ARASY ALIMUDIN, S.E., M.M.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117

Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember _____

No. Induk : 12216038 _____

Alamat : Jl. RA. Kartini No.62 Surabaya _____

Telp/HP : 0818331788 _____

Pembimbing : Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S. _____

Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem
Hukum Pertanahan Indonesia

Tgl Dimulai : 26 Februari 2018 _____

Pembimbing I

Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.

Surabaya, 26 Februari 2018
Mahasiswa

Lie Liem Desember

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember

No. Induk : 12216038

Alamat : Jl. RA. Kartini No.62 Surabaya

Telp/HP : 0818331788

Pembimbing : Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem
Hukum Pertanahan Indonesia

Tgl Dimulai : 26 Februari 2018

Pembimbing II

Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

Surabaya, 26 Februari 2018

Mahasiswa

Lie Liem Desember

Mengetahui,
Ketua Program Studi ~

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS *Marotoma*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117

Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Svarat •

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117

Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember

No. Induk Mahasiswa : 12216038

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 13

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Penggunaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia

Menyetujui Untuk Diuji
Pembimbing,

Prof. Dr. Afdol, S.H.,M.S.

Surabaya, 23 April 2018
Ka. Prodi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117

Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

FORM PENGAJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember

No. Induk Mahasiswa : 12216038

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / MKn 13

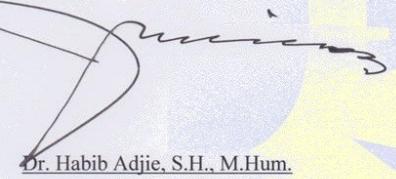
Dengan ini mengajukan permohonan SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia

(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP)

Menyetujui Untuk Diseminarkan
Pembimbing,

Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.



Surabaya, 25 Juli 2018
Ka. Prodi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.





UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS

Pada Hari ini Sabtu, 4 Agustus 2018 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Tesis :

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember

No. Induk Mahasiswa : 12216038

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 13

Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum

Pertanahan Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP)

Yang Dihadiri oleh Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.

Dan Mahasiswa / Masyarakat umum berjumlah Orang.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Tesis ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2018

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.

Mahasiswa : Lie Liem Desember

Peserta Seminar :

1. Henny Kartika, S.H. 	6. Much Ali	11. Wardah
2. Ida Sanjaya	7. Farizyan Adis F	12. Tekti Sri H.M.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117

Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

3. Vitto Odie P.	8. KETUT WILIANTO	13. Hudzhan Arsy
4. Novita Ika S.W. <i>feata</i>	9. Nethyaminah	14. Wirya Aditya
5. Hayuning W	10. MUHAMMAD ANALUDIN KIDA	15. A'raaf Wigaya

18. Rezvan Wachira

19. Ari Juwaningsih

20. Ralih Ermia

21. KARINA

22. TANTRI N.H

23. Laily Nur A.m.

24. Fagustien Baharini

25. AMITA

26. Dwipurni Hartati

16. Subarmaji

17. FERDIANSyah RJRP

18. Elvareta Bayu Sandhyra

PRO PATRIA

SURABAYA



UNIVERSITAS *Narmada*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narmada.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS

NAMA : Lie Liem Desember
N I M : 12216038
Tanggal Penilaian :
Judul Proposal Tesis : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP)
Pembimbing : Prof. Dr.Afdol, S.H., M.S.

PANITIA PENILAIAN PROPOSAL TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Prof. Dr.Afdol, S.H., M.S.	
ANGGOTA	Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.	
ANGGOTA	Dr. Suwardi, S.H., M.H.	

Surabaya,
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan minimal 1 minggu setelah ujian proposal tesis ke pembimbing.



UNIVERSITAS **Narotama**

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117

Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

**KARTU KEHADIRAN MENGIKUTI SEMINAR HASIL PENELITIAN
TESIS**

Nama Mahasiswa : LIE LIEM DESEMBER

No. Induk : 1221 60 38

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PENELITIAN	TGL	PARAF PEMBIMBING
1.	Rahmad Ladeuni Arif Rahman	Kewirausahaan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Kartakarna Pengangkatan Pemantauan Aparat Penegak Hukum	10 Feb' 2018	
2.	Mariano Putra Prayoga Sumbangkut	Kuabsahan Perakitan Aset, Pendan Keagamanan Yang Diprovok Melalui Hibah Bersyarat Tanpa Alfa Omeik	10-Feb' 2018	
3.	Gesang Isuahyudi	Alembat Jadium Kepemilikan Sertifikat Hid Mulya (STM) Lebih dari Lima Bidang Tanah Kawasan	14 Feb' 2018	
4.	Fitriyah	Perlindungan Hukum Terhadap Kuisitor Alembat Kawasannya Dalam Perjanjian Knott Perumahan	15 Feb' 2018	
5.	Lucky Permana Putra, S.H.	Kedudukan Alfa Notaris Yang Dilaksanagani Di Cada Wilayah Jabatan Notaris	17-4-2018	
6.	FANDY PRABOWO	Prinsip Perlindungan yang Sama Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat	6 Juni 2018	
7.	Kadek Yeni Kristiyanti	Pembatasan Hukum Pemisi Narasi dan Kejadian Cuan Pidana Dalam Perspektif Hukum Asasi Manusia	6 Juni 2018	



UNIVERSITAS

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117

Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

8.	Lukman Farid Bahdiar, S.H.	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pengikalan Objek Jaminan Berupa Surat Kuasa Jual Saat Detilor Wampustasi.	19 Juli 2018	
9.	kunardi, S.H.	Kedudukan Akta Notaris Yang Dianggap Tidak Sah Atas Dasar Permi Hukum (Studi Kasus Putusan MA. NO.666 PK/PDT/2011)	19 Juli 2018	
10.	Siti Mukiah, S.H.	Hak Kepemilikan Atas Sertifikat Pemah Susur Di Atas Tanah Hala Guna Pergantian Yang Pernah Diatas Tanah Hala Milik	19 Juli 2018	
11.	Putra Adi Purnomo Djingga Wijaya, S.H.	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilaku kan Oleh Notaris Pengangkatnya.	19 Juli 2018	
12.	Justin Pariningrat Malau, S.H., M.H.	Tanggung Jawab Notaris Renovasi Titipan Sertifikat Hak Atas Tanah Setelah Pembatalan Perjanjian Peny ertaan Jual Beli Cstody Pertama Mahkamah Agung RI Nomor 3176 K / PDT/2013	21 Juli 2018	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

Surabaya,....., 20...
Mahasiswa

LIE LIEM DESEMBER



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember
No. Induk : 12216038
Alamat : Jl. RA. Kartini No.62, Surabaya
Telp/HP : 0818331788
Pembimbing : Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.
Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP)
Tgl Dimulai : 18 Mei 2018

Pembimbing

Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.

Surabaya, 18 Mei 2018
Mahasiswa

Lie Liem Desember

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Rimbahanan Putusan pengadilan.		/
2.	Rimbahanan Tanah Timbul.		/
3.	Definisi Tanah Timbul.		/
4.	Hak Menguasai Negara.		/
5.	Penjelasan Hak Menguasai Negara.		/
6.	Hak Pengelolaan.		/
7.	Undang-Undang Polik Agraria .		/
8.	UU Penda Auktang Perikanahan.		/
9.	UU Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau Kecil.		/
10.	Kewenangan Penguasaan Tanah Timbul.		/
11.	Badan Perikanahan Nasional.		/
12.	Peraturan Menteri Tentang Penyelesaian kasus Perikanahan.		/
13.	Prosedur Penyelesaian kasus Perikanahan.		/
14.	Kesimpulan & Saran.		/

PRO PATRIA

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 12 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember

No. Induk Mahasiswa : 12216038

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 13

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia

(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G.2009/PN.SP)

Mengetahui
Pembimbing,

Prof. Dr. Afdol, S.H.,M.S.

Surabaya,
Mahasiswa

Lie Liem Desember

2018

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Pengajuan Ujian Tesis diajukan paling cepat 6 (Enam) bulan setelah tanggal di keluarkannya surat Bimbingan Tesis, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Kartu Pembimbingan (minimal 12 kali pembimbingan)
2. Sertifikat TOEFL/ILT dengan skor minimal 475 (Extern dari semua PTN, PTS(PETRA, UBAYA), EF, IALF, KELT)
3. Telah meyelesaikan 40 SKS & Tidak memiliki nilai D
4. Tesis 3 rangkap dengan softcover warna Biru UNNAR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pandapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Lie Liem Desember
NIM : 12216038

KATA PENGANTAR

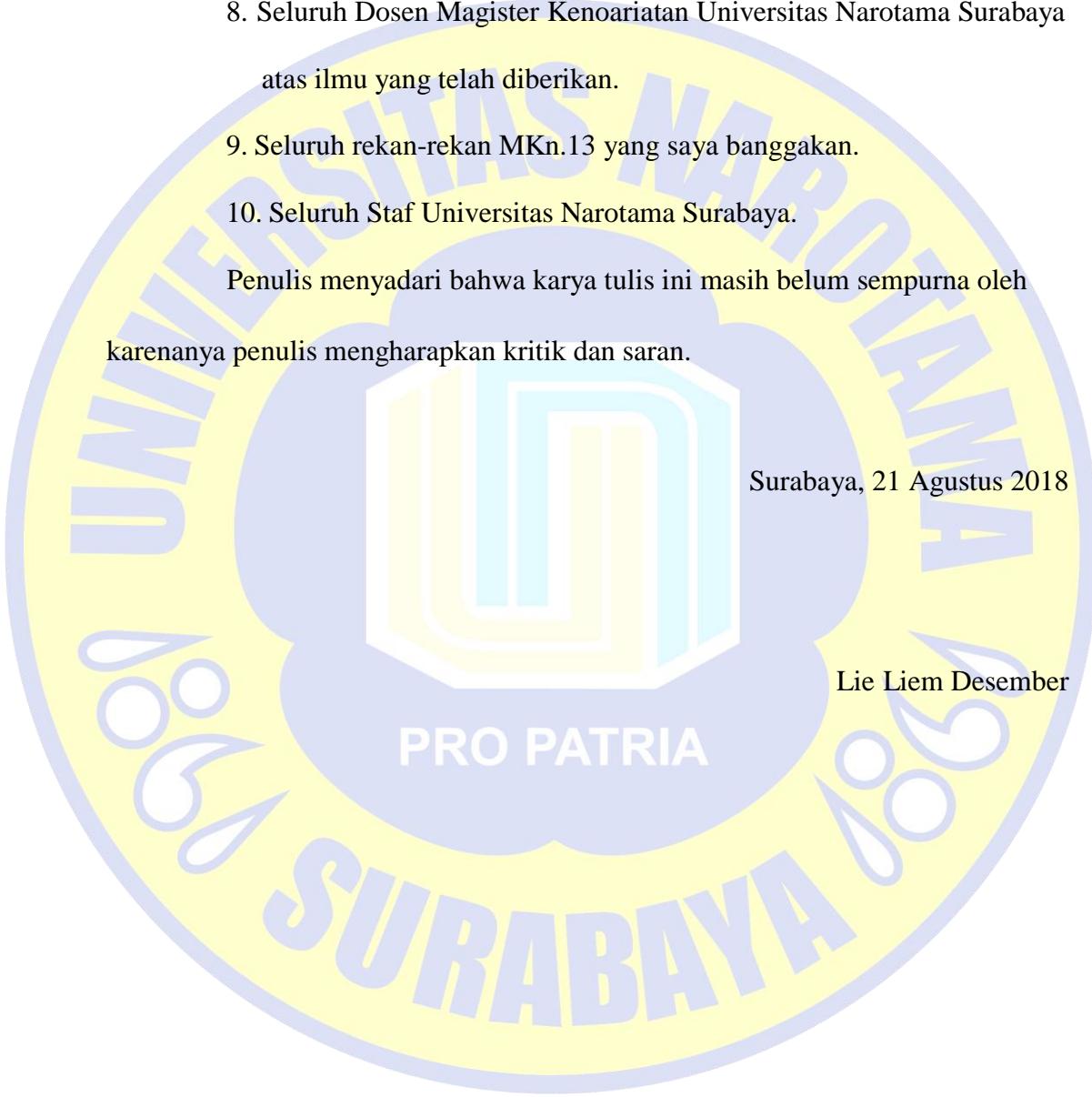
Puji syukur kepada Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul "**PENYELESAIAN SENGKETA PENGUSAAN TANAH TIMBUL (AANSLIBING) DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA** (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP)".

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Narotama dan penulis menyadari bahwa dengan bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat tersusun. Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang dalam kepada:

1. Ibu Hj Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST, M.HP selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama.
3. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama.
4. Bapak Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Tahegga Primananda Alfath, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing proses penelitian ini.

6. Bapak Mohammad Saleh, S.H., M.H selaku Dosen Penemuan Hukum atas kesediaannya membagikan ilmu hukum yang sangat aplikatif.
7. Ibu Kustiati, S.Sos. selaku Kepala Administrasi Fakultas Hukum yang selalu membantu dengan sepenuh hati.
8. Seluruh Dosen Magister Kenoariatan Universitas Narotama Surabaya atas ilmu yang telah diberikan.
9. Seluruh rekan-rekan MKn.13 yang saya banggakan.
10. Seluruh Staf Universitas Narotama Surabaya.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih belum sempurna oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran.



Surabaya, 21 Agustus 2018

Lie Liem Desember

PRO PATRIA

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Pengusahaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP)". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Siapakah yang berhak untuk menguasai tanah timbul (*aanslibbing*)?
2. Apa bentuk penyelesaian sengketa atas tanah timbul (*aanslibbing*) ?

Sesuai dengan rumusan masalah yang dianalisis, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah ada tersebut dikualifikasikan dan dianalisis sehingga dapat membangun argumen untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Berdasarkan penelitian terhadap rumusan masalah yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Negara melalui pemerintah pusat berhak menguasai Tanah Timbul secara langsung hal ini didasarkan Angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 Tahun 1996 Tentang Penetapan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah Pusat dan Provinsi yang berwenang memperoleh Hak Pengelolaan atas Tanah Timbul yang dikuasai oleh negara hal ini didasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan bentuk penyelesaian sengketa atas Tanah Timbul terbagi menjadi dua yaitu, melalui non-litigasi dengan cara pembatalan hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan karena keputusan/penetapannya terbukti mengandung cacat hukum administrasi yaitu pemalsuan warkah-warkah maupun dapat melalui kesepakatan berdamai dari para pihak yang bersengketa, sedangkan melalui litigasi dengan cara di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara seperti pada Putusan No. 16/Pdt.G/2009/PN.SP.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis yaitu *pertama*, seharusnya untuk memberikan kepastian penguasaan atas Tanah Timbul maka sebaiknya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menetapkan Undang-Undang Tentang Hak Menguasai Negara yang didalamnya mengatur mengenai hak menguasai atas Tanah Timbul. *Kedua*, seharusnya bentuk penyelesaian sengketa atas Tanah Timbul (*aanslibbing*) dari putusan No.16/Pdt.G/2009/PN.SP sebenarnya dapat melalui pembatalan hak atas tanah karena keputusan/penetapannya terdapat cacat hukum terbukti data yuridis dan data fisik

atas tanah milik Tergugat I s.d IV adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



ABSTRAK

Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penulisan penelitian ini akan menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa penguasaan tanah timbul dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dengan studi kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/Pn.SP.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, maupun doktrin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah timbul yang dikuasai langsung oleh negara hanya dapat dihakim dalam bentuk Hak Pengelolaan hanya oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme perjanjian didepan dalam bentuk Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan. Bentuk penyelesaian sengketanya dapat melalui pembatalan hak atas tanah karena keputusan/penetapannya terdapat cacat hukum .

Kata kunci : Tanah Timbul, Hak Menguasai Negara, Hak Pengelolaan.

ABSTRACT

Natural arising lands such as delta, coastal land, lake / situ edge, river bank deposits, islands arising and other naturally occurring lands are stated as land directly controlled by the state. Furthermore, the control / ownership and use are regulated by the State Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency in accordance with the applicable laws and regulations.

The writing of this research will examine and analyze further about the resolution of land tenure disputes arising in the Indonesian land law system with a case study of Decision Number 16 / Pdt.G / 2009 / Pn.SP.

The research method used is normative legal research, namely legal research carried out by analyzing the norms and rules of law contained in the legislation, court decisions, and doctrine.

The results of the research show that arising land that is directly controlled by the state can only be blocked in the form of Management Rights only by the central government and provincial government and can be delegated to third parties through the mechanism of agreement in the form of Right of Use or Right to Build. The form of settlement of the dispute can be through the cancellation of land rights because the decision / determination has a legal defect.

Keywords: Embossed Land, Right to Control the State, Management Rights.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul.....	i
Halaman Persyaratan Gelar	ii
Halaman Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	iii
Lembar Pengesahan Tesis Telah Direvisi.....	iv
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	v
Surat Persyaratan	vi
Ringkasan.....	vii
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Orisinalitas Penelitian	9
1.6. Tinjauan Pusaka	13
1.6.1. Teori Hak Penguasaan Atas Tanah	14
1.6.2. Konsep Hak Menguasai Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.....	18

1.6.3. Teori Otonomi Daerah.....	21
1.6.4. Teori Penyelesaian Sengketa.....	25
1.7. Metode Penelitian	27
1.7.1. Tipe Penelitian	27
1.7.2. Pendekatan Penelitian	28
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	29
1.7.4. Proses Pengolahan Bahan Hukum	31
1.7.5. Analisis Bahan Hukum	31
1.8. Sistematika Penulisan	32
BAB II KEWENANGAN PENGUASAAN TANAH TIMBUL	
2.1. Hak Menguasai Negara atas Tanah	33
2.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Tanah Timbul..	49
BAB III BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH TIMBUL	
3.1. Pengertian Sengketa Hukum Atas Tanah Timbul	57
3.2. Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Timbul Melalui Litigasi dan Non-Litigasi.....	66
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	98
4.2. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Negara melalui pemerintah pusat berhak menguasai Tanah Timbul secara langsung. Penguasaan oleh negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berarti bahwa negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta mengawasi pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ukuran konstitusional yaitu "*untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Pemerintah Pusat dan Provinsi yang berwenang memperoleh Hak Pengelolaan atas Tanah Timbul yang dikuasai oleh negara untuk dapat memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mempergunakan empat tolok ukur, yaitu : (i) Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan bentuk penyelesaian sengketa atas Tanah Timbul terbagi menjadi dua yaitu, melalui non-litigasi dengan cara pembatalan hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan karena

keputusan/penetapannya terbukti mengandung cacat hukum administrasi yaitu pemalsuan warkah-warkah maupun dapat melalui kesepakatan berdamai dari para pihak yang bersengketa, sedangkan melalui litigasi dengan cara di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara seperti pada Putusan No. 16/Pdt.G/2009/PN.SP.

4.2. Saran

1. Seharusnya untuk memberikan kepastian penguasaan atas Tanah Timbul maka Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menetapkan Undang-Undang Tentang Hak Menguasai Negara yang didalamnya mengatur mengenai hak menguasai atas Tanah Timbul.
2. Seharusnya bentuk penyelesaian sengketa atas Tanah Timbul (*aanslibbing*) dari putusan No.16/Pdt.G/2009/PN.SP sebenarnya dapat melalui pembatalan hak atas tanah karena keputusan/penetapannya terdapat cacat hukum terbukti data yuridis dan data fisik atas tanah milik Tergugat I s.d IV adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Fitriyah, Farida, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi*, Setara Press, Malang, 2016.

Franciska, Wira, *Kepastian Hukum Pemegang HGB di Atas HPL dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan*, Alfabeta, Bandung, 2016.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009.

Gunanegara, *Intelijen Pertanahan Deteksi Dini Kerugian Negara*, PT Tatanusa, Jakarta, 2017.

Hadjon, Philipus M., “Tentang Wewenang Pemerintahan”, Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998.

Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Perss, Malang, 2012.

Hartanto, Andy, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.

_____, *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2013.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Hasyimzoem, Yusnani, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.

Idham, *Implementasi Politik Hukum Agraria_Pertanahan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Perdesaan*, Alumni, Bandung, 2013.

Mudjiyono, Aloysius, *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.

Kolopaking, Anita, *Penyeludupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013.

Kriekhoff, Valerine J.L., *Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)*, Yayasan Obor, Jakarta , 2001.

Limbong, Bernhard, *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2014.

Lubis, Yamin, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Marbun,SF., *Negara Hukum Indonesia dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.

Marbun, SF., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Marzuki, M. Laica *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2010.

Muliawan, Jarot, *Pengadaan Tanah*, Buku Litera, Yogyakarta, 2016.

Murad, Rusbandi, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

_____, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991.

_____, *Administrasi Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

Nasroen, M., *Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah*, Wolters, Jakarta, 1951, hlm.28, dalam Yusnani Hasyimzoem dkk., *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Parlindungan, A.P., *Beberapa Masalah dalam UUPA*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm. 20

Parlindungan, A.P., *Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Ramelan, Eman, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Satuan Rumah Susun*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014.

Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Pers, Yogyakarta, 2003.

Saleh, Syarif, *Otonomi dan Daerah Otonom*, Endang, Jakarta, 1953.

Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

_____, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

_____, *Teknik Pembuatan Akta*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Santoso, Urip, *Perolehan Hak Atas Tanah*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015.

_____, *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.

_____, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, PT Kharisma Putra, Jakarta, 2014.

_____, *Hukum Agraria*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017.

_____, *Hukum Perumahan*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014.

Urip Santoso, Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Bidang Pertanahan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2011.

Sembiring, Julius, *Tanah Negara*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabetika, Bandung, 2009.

Slaats, Herman, *et al*, *Masalah Tanah di Indonesia dari Masa ke Masa*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Soehendra, Djaka, *Sertifikat Tanah dan Orang Miskin*, Van Vollenhoven Institute, Jakarta, 2010.

Soehino, *Perkembangan Pemerintah di Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Sonny, A., *Etika Lingkungan*, Universitas Michigan, Buku Kompas, 2002.

Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 2013.

Sugiharto, Umar, *Hukum Pengadaan Tanah*, Setara Press, Malang, 2015.

Sumardjono, Maria S.W.. *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Trijono, Rachmat, *Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015

Utomo, *Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Wayong, J., *Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Djambatan, Jakarta, 1975.

Wijaya, Andika, dan Wida Peace Ananta, *Hukum Bisnis Properti*, PT Gramedia, Jakarta, 2017.

Yosua, Suhanan, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Restu Agung, Bandung, 2010.

B. Tesis

Arfy Ufi Amalia, “Status Hukum Atas Tanah Oloran Dalam Pertanahan Di Indonesia”, Tesis, Magister Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, 2016

Fennizar Wulandari Siwi, “Perolehan Hak Milik yang Berasal dari Tanah Oloran (Aanslibbing) oleh Masyarakat dalam Perspektif Hukum Agraria”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016

Khairizal Dermawan Lahabu, "Studi Tentang Pendudukan Terhadap Tanah Timbul (Aanslibbing) di Kawasan Tepian Danau Limboto-Provinsi Gorontalo", Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang, 2016

C. Jurnal

Herlina Ratna Sambawa Ningrum, *Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 Mei-Agustus 2014

Ilyas, Abdurrahman, dan Sufyan, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.65, Th.XVII (April,2015)

Rudiansyah Pulungan, *Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*,
<https://media.neliti.com/media/publications/13957-ID-status-penguasaan-tanah-timbul-aanslibbing-di-kecamatan-rengat-kabupaten-indragi.pdf>, diakses 20 April 2018